

**ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPACITY OF
DISTRICTS/MUNICIPALITIES IN CENTRAL JAVA PROVINCE IN THE
IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY IN 2018-2022**

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
TAHUN 2018-2022**

M Yuswardhanu Suryahadi¹, Agus Budi Santosa²
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Stikubank, Semarang^{1,2}
sekretariat.univ@edu.unisbank.ac.id¹, hanung1818@gmail.com²

ABSTRACT

Regional financial capability has a very important role in supporting the success of regional autonomy. Regional financial capability is an indicator of regional economic independence, which directly impacts on improving people's welfare. Regional regional financial capability is often measured using regional financial performance, in the form of financial ratios obtained from the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The type of data is secondary data in the form of Budget Realization Report data for all Regency / City Fiscal Years 2018-2022. The data analysis method uses quantitative descriptive model analysis, using the Regional Financial Independence Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Regional Financial Capability Index, Efficiency Ratio and Routine Capability Index Ratio. In addition, it is also to determine the factors that affect regional financial capability, as well as efforts to improve regional financial capability. The results showed that there were 23 local governments in the independence ratio, in the very low category with a value below 25%. There are 23 local governments in the Fiscal Decentralization Ratio, in the Less category with a value of 10.01% - 20%. In the Share-Growth Quadrant there are 22 local governments, entering Quadrant I with the category of High Share and High Growth. The dominance factor of the agricultural sector, it is necessary to develop agro-industry, agro-tourism, and biotechnology. The dependency factor on one economic sector, needs to identify potential, strengthen human resources, strengthen MSMEs, and collaborate with the private sector. Covid-19 Pandemic factor, need to increase digital transformation. The factor of low awareness of paying taxes needs education and socialization of the importance of local taxes. The factor of lack of use of information technology must be adjusted to the conditions of regional needs.

Keywords: *Regional Autonomy, Regional Financial Management, Local Government Financial Performance*

ABSTRAK

Kemampuan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi indikator kemandirian ekonomi daerah, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah, berupa rasio keuangan yang didapatkan dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis data adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi Anggaran seluruh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018-2022. Metode analisis data menggunakan analisis model deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian terdapat 23 pemerintah daerah, masuk pada kategori rendah sekali dengan nilai di bawah 25%. Rasio Desentralisasi Fiskal terdapat 23 pemerintah daerah, masuk pada kategori Kurang dengan nilai 10,01% - 20%. Pada Kuadran Share-Growth terdapat 22 pemerintah daerah, masuk Kuadran I dengan kategori Share Tinggi dan Growth Tinggi. Faktor dominasi sektor pertanian, perlu dilakukan pengembangan agroindustri, agrowisata, dan bioteknologi. Faktor ketergantungan pada satu sektor ekonomi, perlu mengidentifikasi potensi, penguatan SDM, memperkuat UMKM, serta kerjasama dengan pihak swasta. Faktor Pandemi Covid-19, perlu meningkatkan transformasi digital. Faktor rendahnya kesadaran membayar pajak perlu edukasi dan sosialisasi pentingnya pajak daerah. Faktor kurangnya penggunaan teknologi informasi harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Kemampuan keuangan daerah memainkan peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai di tingkat lokal, yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan berbagai program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kemampuan keuangan daerah juga mencerminkan kemandirian ekonomi daerah, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah sering diukur melalui kinerja keuangan menggunakan rasio yang diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, analisis rasio keuangan sangat penting untuk menilai kinerja keuangan dan memberikan masukan dalam menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengimplementasikan sistem desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas ini memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari desentralisasi, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, serta memperkuat akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Pemerintah daerah berperan penting dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan. Keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Hal ini diindikasikan oleh kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan dana tersebut secara mandiri. Pengurangan ketergantungan pada bantuan pusat adalah indikator utama kemandirian ekonomi daerah, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah yang berhasil harus didukung oleh kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Kemampuan keuangan yang memadai memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sementara kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam konteks Jawa Tengah, data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan PAD. Ini mengindikasikan tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, meskipun otonomi daerah telah digulirkan. Belanja daerah yang terus meningkat setiap tahun adalah dampak dari kewenangan otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan dengan lebih leluasa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah, seperti yang dilakukan oleh Suharman (2014), Nur Habibah (2014), Runjung (2022), dan Pradana (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah bervariasi, dengan beberapa daerah masih memiliki ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Studi ini bertujuan untuk melanjutkan analisis mengenai kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada periode 2018-2022, untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam kemampuan keuangan daerah tersebut.

Dari gambaran realisasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka diperlukan suatu analisa kemampuan keuangan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu (1) Bagaimana kemampuan keuangan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah, jika ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; Rasio Desentralisasi Fiskal; Indeks Kemampuan Keuangan Daerah; Rasio Efisiensi; serta Rasio Indeks Kemampuan Rutin? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah? (3) Apa saja upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum otonomi daerah, sistem pemerintahan sentralistik menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan birokrasi yang lambat. Otonomi daerah bertujuan mengatasi masalah ini dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan. Wahab (2002) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini. Mardiasmo (2002) menambahkan tiga misi utama otonomi daerah: meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, dan mencapai kesejahteraan sosial yang merata di setiap daerah di Indonesia.

Fajar dan Oktaviani (2022) menjelaskan bahwa penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang penting karena mereka yang menjalankan sistem otonomi daerah, termasuk kepala daerah dan aparatur, sehingga SDM yang kompeten dapat mengelola potensi daerah secara efektif. APBD dan pendapatan daerah juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, di mana pendapatan daerah mendukung pembangunan infrastruktur dan SDM. Aset daerah, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pendapatan potensial melalui pajak dan retribusi, sementara kondisi geografis yang beragam mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di setiap daerah. Faktor eksternal seperti

investasi asing dan kerja sama dengan negara lain dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, memberikan kontribusi signifikan pada keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah mencakup semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang menjadi milik Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan dan pendapatan daerah, dipandu oleh Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). APBD, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Kepala Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan sah sesuai peraturan. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah dan indikator keberhasilan otonomi daerah. PAD meliputi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota, serta retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, seperti keuntungan dari investasi pemerintah daerah dan peningkatan penerimaan daerah. Lain-lain PAD meliputi hasil penjualan aset daerah, kerja sama, jasa giro, dan pendapatan bunga. Kebijakan peningkatan PAD mencakup peningkatan kesadaran pajak, pengembangan potensi daerah, dan reformasi kebijakan perpajakan. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah mencakup dana bagi hasil, alokasi umum dan khusus, insentif fiskal, dan dana otonomi khusus. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah, mencakup penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan dalam kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah, yang terdiri dari belanja operasi, modal, dan transfer, penting untuk pembangunan daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, serta menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja keuangan diukur berdasarkan pencapaian anggaran dan realisasi PAD.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah ketergantungan daerah pada bantuan eksternal, mencerminkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi. Hersey dan Blanchard mengidentifikasi empat pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dari instruktif hingga delegatif, tergantung pada tingkat kemandirian daerah. Rasio desentralisasi fiskal mengukur kewenangan daerah dengan membandingkan PAD terhadap total penerimaan daerah, menunjukkan tingkat tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) dianalisis dengan menghitung share dan growth PAD, mengklasifikasikan kondisi keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. Rasio efisiensi mengukur seberapa efektif penggunaan biaya dalam menghasilkan pendapatan, sementara rasio indeks kemampuan rutin (IKR) menunjukkan seberapa baik PAD dapat membiayai belanja rutin daerah. Semua rasio ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kemandirian, efisiensi, dan kemampuan keuangan daerah dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung melalui media perantara, seperti laporan dan catatan historis yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam studi ini mencakup data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2018-2022. Data ini merupakan informasi

dokumenter yang telah dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, yang memberikan dasar untuk analisis kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif ini dipilih untuk mengumpulkan informasi rinci tentang aspek kemandirian daerah melalui analisis rasio. Pendekatan kuantitatif memungkinkan penjelasan dan analisis data numerik menggunakan metode statistik, yang bermanfaat dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah berdasarkan indikator rasio, share, dan growth.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif kuantitatif, yang mencakup langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyajian data angka untuk memberikan gambaran teratur dan jelas mengenai keadaan atau gejala tertentu. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal; rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah dan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pembayaran pajak dan retribusi, yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Rasio desentralisasi fiskal, diukur dengan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Analisis kemampuan keuangan daerah dimulai dengan perhitungan share dan growth PAD, yang diklasifikasikan menggunakan metode kuadran untuk mengevaluasi peran PAD

dalam belanja dan keberhasilan dari periode ke periode. Rasio efisiensi mengukur seberapa efektif biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan, sementara rasio indeks kemampuan rutin (IKR) menunjukkan kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah. Semua rasio ini memberikan wawasan mendalam mengenai efisiensi, kemandirian, dan kemampuan keuangan daerah.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran pola-pola konsisten dalam data dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan memisahkan komponen relevan dari keseluruhan data, sehingga memudahkan pengelolaan dan penafsiran hasil. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, memberikan wawasan tentang kondisi keuangan daerah secara sistematis dan makna.

Sementara itu, analisis kuantitatif menggunakan data yang diukur dalam skala numerik untuk mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi. Dengan memanfaatkan data terukur seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Dana Ke Daerah (TDD), analisis ini menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan informasi penting untuk kebijakan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama pembiayaan untuk pembangunan dan kemajuan wilayah. PAD, yang mencakup pajak daerah,

retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, menentukan arah pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi PAD, semakin besar potensi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. PAD yang kuat memungkinkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Data realisasi PAD akan digunakan untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.

Pendapatan transfer, yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah lain, memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dana ini digunakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan, dengan pengelolaan yang diatur secara ketat sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dari dana transfer dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan mempercepat pembangunan, serta memajukan pemerataan kesejahteraan. Data realisasi Pendapatan Transfer akan digunakan untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Belanja Daerah mencakup semua kewajiban Pemerintah Daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih selama periode anggaran terkait, dan terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Pengelolaan Belanja Daerah yang efektif dan efisien sangat penting untuk kesuksesan pembangunan daerah. Dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bermanfaat serta mengurangi pemborosan, daerah dapat memaksimalkan manfaat belanja

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data realisasi Belanja Daerah akan digunakan dalam analisis perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tabel 1. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Kab/ Kot	RKKD				Kategori					
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah =	22,7%	23,8%	25,1%	28,3%	26,4%	RS	RS	R	R	R
1	Kab Klaten	21,5%	16,5%	18,8%	14,8%	16,2%	RS	RS	RS	RS	RS
2	Kab Pemalang	15,2%	16,4%	16,8%	17,6%	16,3%	RS	RS	RS	RS	RS
3	Kab Brebes	17,4%	18,0%	20,4%	21,1%	16,4%	RS	RS	RS	RS	RS
4	Kab Banjarnegara	13,5%	14,7%	14,5%	18,9%	16,4%	RS	RS	RS	RS	RS
5	Kab Wonosobo	16,8%	17,3%	17,0%	22,7%	16,4%	RS	RS	RS	RS	RS
6	Kab Pati	20,3%	19,1%	17,1%	17,5%	17,0%	RS	RS	RS	RS	RS
7	Kab Wonogiri	14,1%	13,9%	14,5%	12,5%	17,3%	RS	RS	RS	RS	RS
8	Kab Blora	12,6%	15,1%	20,4%	18,0%	17,6%	RS	RS	RS	RS	RS
9	Kab Purworejo	17,0%	15,5%	17,1%	24,7%	17,9%	RS	RS	RS	RS	RS
10	Kab Purbalingga	18,0%	18,3%	20,4%	24,1%	18,0%	RS	RS	RS	RS	RS
11	Kab Temanggung	17,8%	18,2%	21,2%	23,6%	19,5%	RS	RS	RS	RS	RS
12	Kab Grobogan	15,8%	16,5%	17,4%	20,6%	19,7%	RS	RS	RS	RS	RS
13	Kab Pekalongan	18,2%	19,5%	21,1%	21,2%	19,9%	RS	RS	RS	RS	RS
15	Kab Magelang	17,2%	20,2%	17,0%	18,9%	20,6%	RS	RS	RS	RS	RS
16	Kab Batang	17,1%	17,0%	18,5%	22,7%	20,8%	RS	RS	RS	RS	RS
17	Kab Kebumen	16,3%	18,0%	18,1%	21,2%	22,0%	RS	RS	RS	RS	RS
18	Kab Jepara	20,7%	27,6%	23,4%	22,0%	22,5%	RS	R	RS	RS	RS
14	Kab Sragen	19,0%	19,9%	22,8%	31,4%	20,2%	RS	RS	RS	R	RS
19	Kab Boyolali	19,0%	21,1%	24,6%	28,2%	23,4%	RS	RS	RS	R	RS
20	Kab Rembang	20,7%	21,3%	22,1%	28,1%	23,8%	RS	RS	RS	R	RS
21	Kab Kendal	19,6%	19,7%	21,4%	25,0%	24,1%	RS	RS	RS	R	RS
22	Kab Tegal	18,5%	23,7%	25,9%	27,9%	24,1%	RS	RS	R	R	RS
23	Kab Demak	20,1%	22,1%	29,4%	24,8%	24,9%	RS	RS	R	RS	RS
24	Kab Kudus	21,2%	20,5%	24,6%	32,0%	25,2%	RS	RS	RS	R	R
25	Kab Semarang	24,3%	25,2%	25,0%	45,5%	25,9%	RS	R	R	R	R
26	Kab Cilacap	27,4%	22,8%	25,2%	30,8%	27,3%	R	RS	R	R	R
27	Kab Karanganyar	20,4%	22,7%	23,6%	25,9%	29,5%	RS	RS	RS	R	R
28	Kab Banyumas	26,6%	26,8%	27,1%	30,1%	31,8%	R	R	R	R	R
29	Kab Sukoharjo	28,0%	31,3%	34,8%	34,7%	32,7%	R	R	R	R	R
30	Kota Salatiga	31,5%	35,1%	33,7%	43,4%	35,6%	R	R	R	R	R
31	Kota Pekalongan	25,8%	29,0%	32,8%	36,7%	36,3%	R	R	R	R	R
32	Kota Surakarta	40,3%	40,4%	38,8%	42,4%	47,0%	R	R	R	R	R
33	Kota Tegal	40,1%	39,5%	37,0%	44,5%	48,4%	R	R	R	R	R
34	Kota Magelang	39,1%	40,5%	45,8%	48,6%	62,1%	R	R	R	R	S
35	Kota Semarang	79,1%	86,6%	90,8%	102,8%	105,1%	T	T	T	T	T

Ket.: Rendah Sekali (RS); Rendah (R); Sedang (S); Tinggi (T)

Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tabel di atas, tingkat kemandirian keuangan Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2022 terlihat bahwa Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah:

1) Rendah Sekali ($\leq 25\%$)

Terdapat 23 pemerintah daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Rendah sekali dengan nilai rasio kemandirian di bawah angka 25%. Di antara 23 pemerintah daerah tersebut,

terdapat 16 Kabupaten yang selama Tahun 2018-2022 selalu berada pada kategori Rendah Sekali, yaitu Kab Klaten, Kab Pemalang, Kab Brebes, Kab Banjarnegara, Kab Wonosobo, Kab Pati, Kab Wonogiri, Kab Blora, Kab Purworejo, Kab Purbalingga, Kab Temanggung, Kab Grobogan, Kab Pekalongan, Kab Magelang, dan Kab Batang.

Sedangkan pada 6 pemerintah daerah lain, pada Tahun 2022 juga tetap pada kategori Rendah Sekali, tetapi selama lima tahun terakhir pernah sempat mencapai kategori Rendah. yaitu Kab Jepara, Kab Sragen, Kab Boyolali, Kab Rembang, Kab Kendal, Kab Tegal, dan Kab Demak.

2) Rendah ($\leq 25\%-50\%$)

Terdapat 10 pemerintah daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Rendah dengan nilai rasio kemandirian di antar 25% hingga 50%. Di antara 10 pemerintah daerah tersebut, terdapat 4 Kabupaten yang selama Tahun 2018-2022 pernah sempat pada posisi Rendah Sekali di bawah 25%, yaitu Kab Kudus, Kab Semarang, Kab Cilacap, dan Kab Karanganyar

Sedangkan pada 6 pemerintah daerah lain, selama lima tahun terakhir selalu mencapai pada kategori Rendah. yaitu Kab Jepara, Kab Sragen, Kab Boyolali, Kab Rembang, Kab Kendal, Kab Tegal, dan Kab Demak.

3) Sedang (51%-75%)

Terdapat 1 pemerintah daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Sedang dengan nilai rasio kemandirian di antar 51% hingga 75%, yaitu Kota Magelang, dimana selama Tahun 2018-2021 sebelumnya masih berada pada kategori Rendah.

4) Tinggi (76%-100%)

Terdapat 1 pemerintah daerah, yang masuk pada kategori Tinggi dengan nilai rasio kemandirian di antar 76% hingga 100%, yaitu Kota Semarang, dimana selama Tahun 2018-2022 selalu berada pada kategori Tinggi.

B. Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF)

Tabel 2. Hasil Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Kab/ Kot	RDF = (PAD / PD)					Kategori				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah =	17,3%	17,7%	18,6%	20,9%	20,8%	K	K	K	S	S
1	Kab Wonosobo	12,3%	12,2%	13,4%	17,3%	13,8%	K	K	K	K	K
2	Kab Klaten	15,4%	11,6%	12,8%	12,3%	13,8%	K	K	K	K	K
3	Kab Banjarnegara	11,4%	12,2%	12,0%	15,0%	13,9%	K	K	K	K	K
4	Kab Pemalang	12,4%	13,3%	13,4%	14,0%	14,0%	K	K	K	K	K
5	Kab Brebes	12,2%	12,2%	13,0%	16,4%	14,0%	K	K	K	K	K
6	Kab Pati	13,8%	12,8%	13,0%	14,3%	14,4%	K	K	K	K	K
7	Kab Wonogiri	11,7%	11,8%	12,1%	10,5%	14,7%	K	K	K	K	K
8	Kab Blora	9,6%	11,0%	14,1%	14,7%	15,0%	SK	K	K	K	K
9	Kab Purworejo	14,0%	12,9%	14,1%	19,1%	15,1%	K	K	K	K	K
10	Kab Purbalingga	14,5%	14,7%	16,1%	18,4%	15,1%	K	K	K	K	K
11	Kab Temanggung	14,6%	14,8%	16,8%	18,4%	16,3%	K	K	K	K	K
12	Kab Grobogan	12,9%	13,3%	13,9%	16,1%	16,4%	K	K	K	K	K
13	Kab Pekalongan	14,8%	15,6%	16,6%	16,7%	16,5%	K	K	K	K	K
14	Kab Sragen	15,4%	16,0%	17,8%	23,0%	16,7%	K	K	K	S	K
15	Kab Magelang	14,1%	16,2%	13,9%	15,2%	16,9%	K	K	K	K	K
16	Kab Batang	14,0%	13,9%	14,9%	17,7%	17,2%	K	K	K	K	K
17	Kab Kebumen	13,3%	14,5%	14,6%	16,7%	18,0%	K	K	K	K	K
18	Kab Jepara	16,4%	15,9%	18,1%	17,2%	18,4%	K	K	K	K	K
19	Kab Boyolali	15,4%	16,8%	19,0%	21,2%	18,7%	K	K	K	S	K
20	Kab Rembang	16,6%	16,9%	17,4%	21,1%	19,2%	K	K	K	S	K
21	Kab Kendal	15,7%	15,7%	16,7%	19,1%	19,3%	K	K	K	K	K
22	Kab Tegal	14,7%	15,8%	16,6%	20,6%	19,4%	K	K	K	S	K
23	Kab Demak	16,0%	17,2%	18,8%	18,8%	19,9%	K	K	K	K	K
24	Kab Kudus	16,9%	16,4%	19,0%	23,4%	20,1%	K	K	K	S	S
25	Kab Semarang	18,1%	18,6%	20,0%	23,8%	20,5%	K	K	S	S	S
26	Kab Cilacap	17,2%	17,5%	18,8%	22,2%	21,3%	K	K	K	S	S
27	Kab Karanganyar	16,2%	17,8%	18,1%	19,7%	22,7%	K	K	K	K	S
28	Kab Banyumas	19,9%	20,0%	20,1%	21,8%	24,0%	K	K	S	S	S
29	Kab Sukoharjo	21,1%	21,4%	23,0%	24,9%	24,6%	S	S	S	S	S
30	Kota Salatiga	23,5%	25,4%	24,7%	29,7%	26,2%	S	S	S	S	S
31	Kota Pekalongan	19,8%	21,9%	24,1%	26,1%	26,6%	K	S	S	S	S
32	Kota Surakarta	27,9%	28,1%	26,9%	28,9%	31,9%	S	S	S	S	C
33	Kota Tegal	27,9%	27,5%	26,2%	29,9%	32,6%	S	S	S	S	C
34	Kota Magelang	27,5%	28,3%	30,7%	32,1%	38,3%	S	S	C	C	C
35	Kota Semarang	43,0%	45,3%	46,0%	49,5%	51,2%	B	B	B	B	SB

Keterangan: Sangat Kurang (SK); Kurang (K); Sedang (S); Cukup (C); Baik (B); Sangat Baik

Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan analisis Rasio Desentralisasi Fiskal pada tabel di atas, tingkat desentralisasi fiskal Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2022 terlihat bahwa Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal:

1) Kurang (10,01% - 20%)

Terdapat 23 pemerintah daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Kurang dengan nilai rasio

desentralisasi fiskal di antara angka 10,01% hingga 20%.

Di antara 23 pemerintah daerah tersebut, terdapat 1 Kabupaten yang selama Tahun 2018-2021 pernah sempat pada kategori Sangat Kurang dengan angka di antara 0% - 10%, yaitu Kab Blora.

Kemudian terdapat 18 pemerintah daerah, yang selama Tahun 2018-2022 selalu berada pada kategori Kurang, yaitu Kab Wonosobo, Kab Klaten, Kab Banjarnegara, Kab Pemalang, Kab Brebes, Kab Pati, Kab Wonogiri, Kab Purworejo, Kab Purbalingga, Kab Temanggung, Kab Grobogan, Kab Pekalongan, Kab Magelang, Kab Batang, Kab Kebumen, Kab Jepara, Kab Kendal, dan Kab Demak.

Sedangkan pada 4 pemerintah daerah lain, selama Tahun 2018-2021 sempat mencapai hingga Sedang di antara angka 21,01%-30%, yaitu Kab Sragen, Kab Boyolali, Kab Rembang, dan Kab Tegal.

2) Sedang (20,01% - 30%)

Terdapat 8 pemerintah daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Sedang dengan nilai rasio desentralisasi fiskal di antara angka 20,01% hingga 30%.

Di antara 8 pemerintah daerah tersebut, terdapat 6 pemerintah daerah yang selama Tahun 2018-2021 pernah sempat pada kategori Kurang dengan angka di antara 10,01% hingga 20%, yaitu Kab Kudus, Kab Semarang, Kab Cilacap, Kab Karanganyar, Kab Banyumas, dan Kota Pekalongan.

Sedangkan pada 2 pemerintah daerah yang lain, selama Tahun 2018-2022 selalu berada pada kategori Sedang, yaitu Kab Sukoharjo dan Kota Salatiga.

3) Cukup (30,01% - 40%)

Terdapat 3 pemerintah daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada

kategori Cukup dengan nilai rasio desentralisasi fiskal di antara angka 30,01% hingga 40%.

Seluruh 3 pemerintah daerah tersebut, selama Tahun 2018-2021 pernah sempat pada kategori Sedang dengan angka di antara 20,01% hingga 30%, yaitu Kota Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Magelang.

4) Sangat Baik (> 50%)

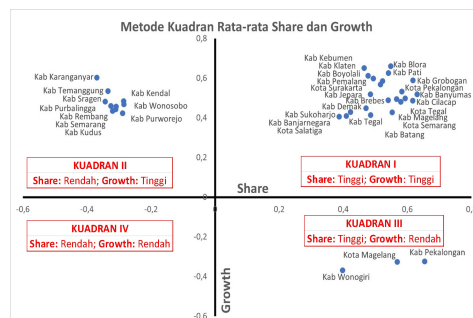
Terdapat 1 pemerintah daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Sangat Baik dengan nilai rasio desentralisasi fiskal di atas angka 50%, yaitu Kota Semarang, dimana pada Tahun 2018-2021 sempat pada kategori Baik dengan angka di antara 40,01% hingga 50%.

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD)

Tabel 3. Hasil Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Kab/ Kot	Index				Kuadran
		S	G	Kat S	Kat G	
	Jumlah =	0,51	0,47	Tinggi	Tinggi	I
1	Kota Salatiga	0,39	0,41	Tinggi	Tinggi	I
2	Kab Banjarnegara	0,41	0,41	Tinggi	Tinggi	I
3	Kab Sukoharjo	0,42	0,43	Tinggi	Tinggi	I
4	Kab Tegal	0,49	0,41	Tinggi	Tinggi	I
5	Kab Demak	0,47	0,45	Tinggi	Tinggi	I
6	Kab Batang	0,55	0,43	Tinggi	Tinggi	I
7	Kab Jepara	0,48	0,52	Tinggi	Tinggi	I
8	Kab Brebes	0,54	0,49	Tinggi	Tinggi	I
9	Kota Semarang	0,58	0,48	Tinggi	Tinggi	I
10	Kab Magelang	0,57	0,49	Tinggi	Tinggi	I
11	Kota Surakarta	0,52	0,57	Tinggi	Tinggi	I
12	Kab Klaten	0,48	0,61	Tinggi	Tinggi	I
13	Kota Tegal	0,59	0,50	Tinggi	Tinggi	I
14	Kab Boyolali	0,49	0,60	Tinggi	Tinggi	I
15	Kab Cilacap	0,62	0,49	Tinggi	Tinggi	I
16	Kab Pemaslang	0,52	0,59	Tinggi	Tinggi	I
17	Kota Pekalongan	0,58	0,53	Tinggi	Tinggi	I
18	Kab Kebumen	0,46	0,65	Tinggi	Tinggi	I
19	Kab Banyumas	0,63	0,52	Tinggi	Tinggi	I
20	Kab Pati	0,54	0,63	Tinggi	Tinggi	I
21	Kab Grobogan	0,62	0,59	Tinggi	Tinggi	I
22	Kab Bora	0,55	0,66	Tinggi	Tinggi	I
23	Kab Purworejo	0,29	0,42	Rendah	Tinggi	II
24	Kab Wonosobo	0,28	0,47	Rendah	Tinggi	II
25	Kab Semarang	0,31	0,44	Rendah	Tinggi	II
26	Kab Kudus	0,32	0,43	Rendah	Tinggi	II
27	Kab Rembang	0,31	0,46	Rendah	Tinggi	II
28	Kab Kendal	0,29	0,48	Rendah	Tinggi	II
29	Kab Purbalingga	0,33	0,46	Rendah	Tinggi	II
30	Kab Sragen	0,34	0,48	Rendah	Tinggi	II
31	Kab Temanggung	0,33	0,53	Rendah	Tinggi	II
32	Kab Karanganyar	0,37	0,60	Rendah	Tinggi	II
33	Kab Wonogiri	0,40	0,37	Tinggi	Rendah	III
34	Kota Magelang	0,57	0,33	Tinggi	Rendah	III
35	Kab Pekalongan	0,65	0,32	Tinggi	Rendah	III

Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (Data Diolah)



Gambar 1. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata Share dan Growth (%) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Berdasarkan analisis Indeks Kemampuan Keuangan Daerah pada gambar di atas, dengan metode kuadran diketahui bahwa jumlah kabupaten/kota pada masing-masing kuadran terdapat pada Kuadran I hingga Kuadran III, sedangkan pada Kuadran IV tidak terisi.

1) Kuadran I (Share: Tinggi; Growth: Tinggi)

Terdapat 22 pemerintah daerah, yang masuk pada Kuadran I dengan kategori Share adalah Tinggi dan Growth adalah Tinggi, yaitu Kab Banjarnegara, Kab Banyumas, Kab Batang, Kab Bora, Kab Boyolali, Kab Brebes, Kab Cilacap, Kab Demak, Kab Grobogan, Kab Jepara, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kab Magelang, Kab Pati, Kab Pemaslang, Kab Sukoharjo, Kab Tegal, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal.

2) Kuadran II (Share: Rendah; Growth: Tinggi)

Terdapat 10 pemerintah daerah, yang masuk pada Kuadran II dengan kategori Share adalah Rendah dan Growth adalah Tinggi, yaitu Kab Purworejo, Kab Wonosobo, Kab Semarang, Kab Kudus, Kab Rembang, Kab Kendal, Kab Purbalingga, Kab

Sragen, Kab Temanggung, dan Kab Karanganyar.

3) Kuadran III (Share: Tinggi; Growth: Rendah)

Terdapat 3 pemerintah daerah, yang masuk pada Kuadran III dengan kategori Share adalah Tinggi dan Growth adalah Rendah, yaitu Kab Pekalongan, Kab Wonogiri, dan Kota Magelang.

4) Kuadran IV (Share: Rendah; Growth: Rendah)

Tidak terdapat pemerintah daerah, yang masuk pada Kuadran IV dengan kategori Share adalah Rendah dan Growth adalah Rendah.

C. Faktor-Faktor Dan Upaya Yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian, beberapa faktor kunci mempengaruhi kemampuan keuangan daerah serta upaya peningkatannya. Pertama, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian adalah kunci untuk kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi utama untuk mencapainya meliputi pengembangan agroindustri, agrowisata, dan bioteknologi. Kedua, ketergantungan pada satu sektor ekonomi dapat menghambat pertumbuhan daerah, sehingga diversifikasi ekonomi menjadi penting. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi sektor unggulan, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sektor UMKM, dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendorong kemajuan ekonomi.

Ketiga, dampak pandemi Covid-19 telah melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, memerlukan pemulihan komprehensif dan berkelanjutan. Fokus utama harus pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan percepatan transformasi digital. Upaya pemulihan

harus fleksibel, adaptif, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam protokol kesehatan serta mendukung program pemulihan. Kerjasama dan gotong royong sangat penting untuk membangun kembali perekonomian yang lebih kuat dan tangguh.

Keempat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi sangat penting untuk mendongkrak pendapatan dan pembangunan daerah. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan tingkat kepatuhan dapat meningkat, menciptakan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Terakhir, teknologi informasi (TI) memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi dan monitoring berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya, dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur TI yang memadai, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat kerjasama antar instansi terkait.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2018-2022 mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2022, terdapat 23 pemerintah daerah yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian di bawah 25%. Sementara itu, 10 daerah lainnya berada dalam kategori rendah dengan rasio antara 25% hingga 50%. Selain itu, terdapat 1 pemerintah daerah yang masuk kategori sedang dengan rasio antara 51% hingga 75%, dan 1 daerah yang tergolong tinggi dengan rasio kemandirian antara 76% hingga 100%.

Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2018-2022

menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2022, terdapat 23 pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori kurang dengan rasio desentralisasi fiskal antara 10,01% hingga 20%. Sebanyak 8 daerah berada dalam kategori sedang dengan rasio antara 20,01% hingga 30%, dan 3 daerah masuk dalam kategori cukup dengan rasio antara 30,01% hingga 40%. Hanya 1 pemerintah daerah yang tergolong sangat baik dengan rasio desentralisasi fiskal di atas 50%.

Analisis Indeks Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan metode kuadran menunjukkan distribusi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang diteliti. Pada Kuadran I, terdapat 22 daerah dengan kategori Share dan Growth keduanya tinggi. Sebanyak 10 daerah berada di Kuadran II, dengan Share rendah dan Growth tinggi. Tiga daerah terletak di Kuadran III, di mana Share tinggi tetapi Growth rendah. Tidak ada daerah yang masuk ke Kuadran IV, yang mencerminkan kategori Share dan Growth rendah. Ini menunjukkan variasi dalam kemampuan keuangan daerah di provinsi tersebut.

Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor, serta pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca-pandemi Covid-19. Peningkatan kesadaran pajak dan pemanfaatan teknologi informasi juga penting untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun perekonomian yang lebih kuat dan tangguh.

Saran

Berdasarkan hasil data dan penelitian yang telah dianalisis, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Pertama, identifikasi dan kembangkan sektor ekonomi unggulan seperti pariwisata, industri kreatif, dan pertanian, sambil mendorong pertumbuhan UMKM di sektor-sektor tersebut. Kedua, kelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perizinan dan pengelolaannya. Ketiga, tingkatkan kepatuhan pajak dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta permudah proses pembayaran pajak dengan transparansi. Keempat, manfaatkan teknologi informasi seperti sistem e-pajak dan e-retribusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD. Terakhir, jalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendorong investasi di daerah dan berikan insentif guna menarik lebih banyak investor.

Daftar Pustaka

- Albasyari (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021. Yogyakarta, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
- Arifiyanti (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Fahrizal (2019). Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017. Magelang, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
- Fajar (2023). Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016-2021). Jakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Muhammad Fajar, Hevi Dwi Oktaviani. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. ISSN Cetak :2354-9033.

- Habibah, N. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013. *Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Hartono (2022) dengan judul Faktor-Faktor Pendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas). Banyumas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran RI Nomor 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mardiasmo (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Prasetyo (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. Salatiga, *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*.
- Rama Aji Pradana, Fajar Syaiful Akbar (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya Periode 2018-2021. *Jurnal Sustainable* Vol. 03, No.01, Mei 2023.
- R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung, Anindita Primastuti, Riswati (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Vol 9 No. 2: JEKP (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*).
- Sijabat, MentariYosephen (2014) Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Sukanto (2011). Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Suparmoko, M. (2001). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah edisi pertama. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Suharman. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas. *Equator Jurnal Of Management And Entrepreneurship*.
- Thohari (2023) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Kelontong Di Pasar Tradisional Bung Karno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Yogyakarta, Fakultas akwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wahab, Solichin A. (2002). Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah). Surabaya: Penerbit SIC.